

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data survei harga kebutuhan pokok pada Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar) di Pasar Banjar, pada Bulan April - Juni 2025 dapat disampaikan secara umum terjadi fluktuasi harga pada sejumlah komoditas pangan pokok dan penting di Indonesia. Beberapa komoditas, terutama yang sensitif terhadap kondisi cuaca dan pasokan (seperti cabe merah, cabe rawit merah, bawang merah dan putih), menunjukkan fluktuasi harga yang signifikan, yang dapat berisiko untuk kestabilan harga di kedepannya.

No Komoditas	April		Mei		Juni		Perubahan
	M2	M4	M2	M4	M2	M4	
1 Beras Medium	Rp 12.000	Rp 11.700	Rp 11.700	Rp 12.500	Rp 12.700	Rp 12.700	0,00%
2 Beras Premium	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	0,00%
3 Cabe Merah	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 32.000	Rp 28.000	Rp 50.000	Rp 28.000	-44,00%
4 Bawang Merah	Rp 56.000	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 45.000	28,57%
5 Daging Ayam Broiler	Rp 28.000	Rp 25.000	Rp 28.000	Rp 27.000	Rp 28.000	Rp 30.000	7,14%
6 Telur Ayam Ras	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	0,00%
7 Daging Sapi	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	0,00%
8 Gula Pasir Lokal	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	0,00%
9 Bawang Putih	Rp 48.000	Rp 40.000	Rp 44.000	Rp 40.000	Rp 38.000	Rp 38.000	0,00%
10 Cabe Rawit Merah	Rp 105.000	Rp 52.000	Rp 40.000	Rp 38.000	Rp 50.000	Rp 75.000	50,00%
11 Minyak Goreng Kita	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	Rp 17.000	0,00%
12 Mie Instan	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	0,00%
13 Susu Bubuk	Rp 56.400	Rp 56.400	Rp 56.400	Rp 56.400	Rp 56.400	Rp 56.400	0,00%
14 Ikan Kembung	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	0,00%
15 Tempe 1 Kg	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 12.500	Rp 14.000	12,00%
16 Tepung Terigu Segitiga B	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	0,00%
17 Udang	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	0,00%
18 Tahu Mentah 1 Kg	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	0,00%
19 Pisang 1 Kg	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	0,00%
20 Susu Balita (SGM) 400Gr	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	Rp 40.500	0,00%
21 Jeruk 1 Kg	Rp 28.000	Rp 26.000	Rp 26.000	Rp 26.000	Rp 20.000	Rp 20.000	0,00%

### **a. IPH Kota Banjar Triwulan II 2025**

Secara keseluruhan, perkembangan IPH Triwulan II 2025 menunjukkan pola yang didominasi oleh tekanan deflasi pada April dan Mei, sebelum kembali mengalami penguatan pada Juni. Kondisi ini mencerminkan adanya fase koreksi harga yang cukup dalam pada pertengahan triwulan, seiring membaiknya pasokan, sebelum kembali meningkat menjelang akhir periode. Pola tersebut mengindikasikan bahwa stabilitas harga pada Triwulan II relatif lebih terjaga dibandingkan Triwulan I, meskipun masih terdapat potensi volatilitas pada komoditas tertentu.

#### **◦ April 2025**

Pada April 2025, IPH Kota Banjar menunjukkan pergerakan yang bervariasi, dengan kisaran nilai antara 0,68 hingga -1,63. Pada awal bulan, IPH masih berada pada zona positif, mencerminkan sisa tekanan harga dari periode sebelumnya. Namun, pada minggu berikutnya terjadi koreksi hingga memasuki zona negatif. Kondisi ini mengindikasikan mulai terjadinya normalisasi harga, seiring meningkatnya pasokan dan menurunnya permintaan pasca Ramadhan dan Idul Fitri.

#### **◦ Mei 2025**

Memasuki Mei 2025, IPH mengalami tekanan deflasi yang lebih dalam, dengan nilai berada pada kisaran -3,35 hingga -4,28. Penurunan ini mencerminkan melimpahnya pasokan komoditas pangan, khususnya dari sektor pertanian dan hortikultura, serta relatif lemahnya permintaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses stabilisasi harga berjalan cukup efektif, meskipun perlu diwaspadai potensi tekanan terhadap pendapatan petani akibat penurunan harga yang terlalu tajam.

#### **◦ Juni 2025**

Pada Juni 2025, IPH kembali bergerak positif dengan kisaran nilai antara 0,63 hingga 0,96. Kenaikan ini mengindikasikan mulai meningkatnya tekanan harga, seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat dan mulai berkurangnya pasokan pada beberapa komoditas. Meskipun demikian, level IPH yang relatif moderat menunjukkan bahwa kenaikan harga masih berada dalam batas yang terkendali.

### **b. Komoditas dengan kenaikan signifikan**

Pada periode April hingga Juni, salah satu komoditas yang menunjukkan kenaikan harga adalah beras medium. Pada bulan April, harga beras medium tercatat Rp11.700,- kemudian naik menjadi Rp12.500,- pada bulan Juni, yang menunjukkan kenaikan sebesar 6,84% pada bulan Mei dan 5,83% pada bulan Juni. Kenaikan harga ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti permintaan yang meningkat atau adanya penurunan pasokan. Selain itu, daging ayam broiler juga mengalami kenaikan harga dari Rp28.000,- di bulan Mei menjadi Rp30.000,- (7,13%) di bulan Juni.

### **c. Komoditas dengan Harga stabil**

Beberapa komoditas menunjukkan kestabilan harga selama triwulan II ini, antara lain:

- Beras premium: stabil di harga Rp16.000 per kilogram.
- Minyak goreng kita : tetap di harga Rp17.000 per liter.
- Susu bubuk, tempe, tahu, pisang, udang, dan susu balita (SGM) juga menunjukkan tidak

ada perubahan harga yang signifikan.

Stabilitas harga ini menandakan bahwa faktor musiman tidak memberikan dampak signifikan pada komoditas-komoditas tersebut, dan pasokan dapat dipenuhi secara konsisten. Dalam hal ini, stabilitas harga menjadi indikasi bahwa komoditas-komoditas tersebut memiliki daya tahan yang baik terhadap guncangan pasar.

#### **d. Komoditas dengan penurunan harga**

Penurunan harga tercatat pada:

- Cabe Merah turun dari Rp40.000,- (M2 April) menjadi Rp28.000,- (M4 Juni) atau sekitar -30%.
- Cabe Rawit Merah turun dari Rp105.000,- (M2 April) menjadi Rp75.000,- (M4 Juni) atau sekitar -28,57%.
- Bawang Merah turun dari Rp56.000,- (M2 April) menjadi Rp45.000,- (M4 Juni) atau sekitar -19,64%.
- Bawang Putih turun dari Rp48.000,- (M2 April) menjadi Rp38.000,- (M4 Juni) atau sekitar -20,83%.
- Jeruk turun dari Rp28.000,- (M2 April) menjadi Rp20.000,- (M4 Juni) atau sekitar -28,57%.
- Daging Sapi turun dari Rp130.000,- (M2 April) menjadi Rp125.000,- (M4 Juni) atau sekitar -3,85%.

#### **e. Tren Bulanan**

Pada bulan April, harga beberapa komoditas seperti Cabe Merah dan Bawang Merah menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Kondisi ini dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan akibat panen musiman, serta meredanya permintaan masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Normalisasi pola konsumsi setelah periode Lebaran turut menekan harga, sehingga mendorong terjadinya koreksi yang cukup dalam pada sejumlah komoditas hortikultura.

Memasuki bulan Mei, terjadi sedikit pemulihan harga pada sebagian komoditas, seiring dengan mulai stabilnya pola permintaan masyarakat setelah periode pasca-HBKN. Namun demikian, beberapa komoditas seperti Cabe Rawit Merah masih menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasokan masih relatif berlebih, sementara permintaan belum sepenuhnya pulih, sehingga tekanan deflasi masih berlanjut.

Pada bulan Juni, pasar mengalami fluktuasi harga yang cukup besar. Kenaikan harga pada komoditas Beras Medium dan Daging Ayam Broiler mencerminkan mulai meningkatnya permintaan masyarakat, seiring dengan stabilitas pasokan yang relatif terjaga dan aktivitas ekonomi yang kembali normal pasca-Lebaran. Perubahan tren ini menunjukkan adanya proses penyesuaian pasar menuju kondisi yang lebih seimbang.

Namun demikian, komoditas seperti Cabe Merah dan Cabe Rawit Merah justru mengalami penurunan harga yang cukup tajam. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di Pasar Banjar, khususnya pada komoditas hortikultura yang sensitif terhadap faktor musim dan distribusi. Situasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi pengelolaan pasokan dan distribusi untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

## f. Komoditas Pangan dengan Risiko Tinggi ke depan

### ◦ Beras Medium

Beras medium menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten sepanjang Triwulan II 2025, dari Rp11.700 per kilogram pada April menjadi Rp12.500 per kilogram pada Juni. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan dari sisi permintaan serta potensi keterbatasan pasokan pasca panen raya. Faktor risiko utama berasal dari ketergantungan pada musim tanam, fluktuasi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta potensi gangguan distribusi antar daerah. Apabila **pengelolaan stok dan penyaluran tidak optimal**, maka pada Triwulan III **harga beras medium berpotensi terus meningkat** dan memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi, mengingat perannya sebagai komoditas utama dalam struktur konsumsi masyarakat.

### ◦ Cabe Merah

Harga cabe merah mengalami penurunan yang cukup tajam selama Triwulan II 2025, dari Rp40.000 per kilogram pada minggu kedua April menjadi Rp28.000 per kilogram pada minggu keempat Juni, atau turun sekitar 30%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan pasca panen dan normalisasi permintaan pasca Idul Fitri. Faktor risiko utama komoditas ini terletak pada tingginya ketergantungan terhadap kondisi cuaca, pola tanam musiman, serta keterbatasan daya simpan. Memasuki Triwulan III, **terdapat risiko terjadinya rebound harga** apabila terjadi gangguan produksi akibat kemarau atau hambatan distribusi, sehingga berpotensi memicu lonjakan harga dalam waktu singkat.

### ◦ Cabe Rawit Merah

Cabe rawit merah juga mengalami penurunan harga yang signifikan sepanjang April hingga Juni 2025, dari Rp105.000 per kilogram pada minggu kedua April menjadi Rp75.000 per kilogram pada minggu keempat Juni, atau turun sekitar 28,57%. Penurunan ini mencerminkan kondisi surplus pasokan dalam jangka pendek. Namun demikian, produksi cabai rawit relatif rentan terhadap perubahan cuaca, serangan hama, serta fluktuasi luas tanam. Faktor-faktor tersebut menjadikan komoditas ini sangat sensitif terhadap gangguan pasokan. Pada Triwulan III, **penurunan produksi atau gangguan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga** secara cepat, sehingga cabai rawit merah tetap menjadi salah satu komoditas dengan risiko inflasi yang tinggi.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Perubahan harga komoditas pada Triwulan II 2025 menunjukkan bahwa permasalahan utama pengendalian harga di daerah **masih didominasi oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang bersifat musiman serta kerentanan distribusi**.

Kenaikan harga beras medium dari Rp11.700 (April) menjadi Rp12.500 (Juni) serta kenaikan daging ayam broiler dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 menunjukkan adanya tekanan dari sisi permintaan dan biaya produksi. Kenaikan ini relatif tidak berkaitan langsung dengan faktor cuaca ekstrem, melainkan lebih **mencerminkan penyesuaian pasokan pasca panen serta dinamika konsumsi masyarakat**. Data tambahan mengenai **peningkatan permintaan pada momentum Idul Adha menjadi faktor yang relevan**, khususnya untuk daging ayam, karena konsumsi protein hewani cenderung meningkat pada periode tersebut. Namun untuk beras, kenaikan harga lebih mencerminkan faktor struktural pasokan dan pengelolaan stok.

Sementara itu, penurunan tajam pada cabai merah (Rp40.000 menjadi Rp28.000), cabai rawit merah (Rp105.000 menjadi Rp75.000), bawang merah (Rp56.000 menjadi Rp45.000), bawang putih (Rp48.000 menjadi Rp38.000), dan jeruk (Rp28.000 menjadi Rp20.000) menunjukkan adanya kondisi surplus pasokan pada periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa gangguan cuaca yang sebelumnya memicu kenaikan harga pada Triwulan I tidak lagi dominan pada Triwulan II. Dengan demikian, faktor curah hujan tinggi dan gagal panen yang relevan pada TW I tidak sepenuhnya menjadi penyebab dinamika TW II. Sebaliknya, kondisi panen yang membaik dan distribusi yang kembali normal lebih berperan dalam mendorong koreksi harga.

Di sisi lain, **keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banjar** turut menjadi kendala dalam memperkuat program stabilisasi harga, baik melalui penguatan sistem distribusi, fasilitasi logistik, penyuluhan kepada petani, maupun pelaksanaan intervensi pasar. Keterbatasan fiskal tersebut menyebabkan ruang gerak program pengendalian harga menjadi terbatas, kurang optimal, dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga daya tahan daerah dalam meredam gejolak harga masih relatif lemah, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### a. Keterjangkauan Harga

- Selasa Pasar Hasil Tani (Sapa Hati) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada triwulan II dilaksanakan sebanyak 1 kali (19 Juni 2025), konsep membuka pasar bagi para petani yaitu dalam rangka mempertemukan petani dengan konsumen. Ada berbagai komoditas yang ditawarkan oleh petani dalam kegiatan ini, mulai dari Cabe, bawang, beras dan aneka macam komoditas penyumbang inflasi. Yang tentunya komoditas yang dijual di acara ini memiliki harga yang lebih murah ketimbang harga pasar. Leading Sektor Jumpa Hati ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- Operasi Pasar Murah (OPM) pada triwulan II dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tanggal 03 Juni 2025.
- Operasi Pasar Murah Bersubsidi (Opadi) triwulan II dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tanggal 04 Juni 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar. Operasi Pasar Murah Bersubsidi sebagai upaya konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, khususnya menjelang periode rawan inflasi. Pelaksanaan program ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial, perlindungan daya beli masyarakat, dan pengendalian inflasi daerah.
- Pemantauan harga di pasar tradisional dilaksanakan setiap hari senin s.d jum'at dengan pasar pantauan yaitu Pasar Banjar.

#### b. Ketersediaan Pasokan

- Dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah dan mendorong kemandirian sektor pertanian, Pemerintah Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan Gerakan Menanam yang dilaksanakan pada tanggal 23 April, 14 Mei dan 04 Juni 2025.
- Pelaksanaan Panen Raya Padi Serentak dengan rata-rata panen sebesar 7 ton/hektar, dimana lebih banyak dari rata-rata panen GKG Provinsi Jawa Barat (07 April 2025).
- Kegiatan Pakarangan Sagala Aya (PAKAYA-P2L) Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

(KWT) dalam penanaman tanaman sayuran/komoditas penyumbang inflasi di tingkat rumah tangga

### c. Kelancaran Distribusi

- Pemantauan ketersediaan bahan pangan pokok tingkat distributor merupakan bagian penting dari upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga di daerah. Selama Triwulan II tahun 2025, Dinas KUKMP dan Dinas KP3 Kota Banjar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar telah melakukan observasi dan pengumpulan data lapangan terhadap stok dan distribusi pangan pada tingkat distributor dan pedagang pasar di Kota Banjar.
- Pada Tw II 2025, **dilanjutkan** perbaikan infrastruktur jalan di Jalan Lili Kusuma dan Jalan Rejasari sepanjang 40,059 km sebagai upaya memperlancar distribusi barang dan pangan. Tercovered sebesar 20km.

### d. Komunikasi Efektif

- *High Level Meeting* Pemerintah Kota Banjar dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Pj. Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar perihal pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan sebanyak 5 kali pada triwulan II 2025 (14 & 22 April 2025, 26 Mei dan 04 & 30 Juni 2025). Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar menginstruksikan agar memperhatikan penyebab terjadinya inflasi di Kota Banjar. Jangan sampai penyebab inflasi di Kota Banjar membuat daya beli masyarakat yang menurun.
- Pelaksanaan Sidak Pasar di Kota Banjar selama triwulan II dilaksanakan sebanyak 6 kali (14 & 30 April, 05 & 30 Mei, 09 & 30 Juni 2025) dengan tujuan untuk memantau ketersediaan stok komoditas pangan pokok, sidak pasar pun dilakukannya untuk memastikan keamanan pangan yang dijual di pasar. Adapun leading sector sidak pasar sendiri yaitu dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Dinas KP3.
- Mengikuti Rapat Koordinasi Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- Pelaporan harga pangan secara harian melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Silinda) Jabar, Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawas Pagi) dan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
- Publikasi data harga bahan kebutuhan pokok di media sosial dan Papan running text yang ada di depan alun-alun Kota Banjar.
- Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar.

## 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### a. Keterjangkauan Harga (K1)

- Upaya intervensi pasar (SapaHati dan GPM) memiliki potensi untuk meningkatkan keterjangkauan harga, tetapi efektivitasnya terbatas karena hanya dilaksanakan sebulan sekali bahkan pada triwulan II ini hanya dilaksanakan 1 kali.
- Evaluasi efektivitas Sapa Hati, OPM, dan GPM secara lebih mendalam, termasuk cakupan, dampak terhadap harga pasar, dan keberlanjutan. Pertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi atau cakupan program intervensi pasar, terutama untuk komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga.

## **b. Ketersediaan Pasokan (K2)**

- Program PAKAYA-P2L merupakan langkah positif untuk meningkatkan kemandirian pangan lokal, tetapi dampaknya belum terasa signifikan dalam jangka pendek.
- Fokus pada perluasan dan penguatan program PAKAYA-P2L, termasuk pendampingan, pelatihan, dan penyediaan bibit yang berkualitas. Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kontribusi PAKAYA-P2L terhadap pasokan pangan lokal.

## **c. Kelancaran Distribusi (K3)**

- Perlu melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Pemerintah Kota Banjar dengan Daerah penghasil agar dapat menutupi stok bahan pangan yang cenderung stoknya sedikit di triwulan II Kota Banjar.

## **d. Komunikasi Efektif (K4)**

- Pemerintah Kota Banjar telah melakukan upaya yang baik dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengawasan pasar.
- Tingkatkan kualitas dan diseminasi informasi harga, termasuk analisis penyebab fluktuasi harga dan rekomendasi bagi konsumen dan pelaku pasar. Perkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian inflasi.
- Lebih peka dengan data yang ada dilapangan, dimana selama triwulan II Kota Banjar mengalami inflasi, sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam rangka mengatasi inflasi ini, karena bisa membuat konsumen atau masyarakat merugi dengan harga yang semakin naik.
- Penyediaan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terkoordinasi sehingga menghasilkan satu data harga ditingkat konsumen (pasar tradisional) atau bahkan harga di tingkat
- Rapat koordinasi di tingkat teknis perlu dilakukan lebih rutin dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholder terkait lainnya.

## **5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

1. Pemerintah Kota Banjar perlu bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengadakan Sapahati, OPM dan GPM sehingga dapat meningkatkan frekuensi pelaksanaannya.
2. Pemerintah Kota Banjar perlu memperluas dan memperkuat program PAKAYA-P2L, dengan memberikan pendampingan intensif, pelatihan yang relevan, dan penyediaan bibit berkualitas kepada masyarakat.
3. Mengimplementasikan program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan daya beli mereka dalam menghadapi inflasi.
4. Identifikasi dan atasi hambatan dalam rantai pasok dan distribusi pangan, seperti infrastruktur yang kurang memadai, biaya transportasi yang tinggi, atau praktik spekulasi yang merugikan.
5. Penting untuk bekerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan untuk memastikan pasokan tetap stabil, terutama untuk komoditas yang stoknya cenderung sedikit di Kota Banjar.
6. Pemerintah Kota Banjar perlu meningkatkan kualitas dan diseminasi informasi harga, termasuk analisis penyebab fluktuasi harga dan rekomendasi bagi konsumen serta pelaku pasar.

Perkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian inflasi, termasuk Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas KP3, Bank Indonesia, dan BPS.

8. Lebih peka terhadap data yang ada di lapangan, terutama terkait inflasi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian yang dialami masyarakat akibat kenaikan harga.
9. Penyediaan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terkoordinasi, sehingga tercipta satu data harga yang akurat dan terpercaya.
10. Rapat koordinasi di tingkat teknis perlu dilakukan lebih rutin dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholder lainnya, untuk membahas isu-isu terkini dan merumuskan solusi yang efektif.
11. Hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas teknis terkait supaya dapat disinkronkan dengan hasil pemantauan Dinas KUKMP dan selanjutnya dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder (pemangku kepentingan), sebagai pemberi bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah Kota Banjar dalam menyikapi perkembangan fluktuasi harga terkini dan langkah-langkah strategis yang diperlukan.
13. Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah untuk mendanai program pengendalian inflasi dan pengembangan infrastruktur yang mendukung stabilitas harga.